

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Penelitian**

Menurut UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa penyelenggaran pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan keikhlasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai salah satu penerapan bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintah yang diatur dalam undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara dan undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, upaya dalam mewujudkan upaya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005, (Putri, 20017).

Pemerintahan yang baik dapat dilihat dari kinerja aparatur yang mendukung pelaksanaan pemerintahan yang demokratis sehingga masyarakat yakin terhadap hasil kerja aparatur yang telah dilaksanakan, bahwa setiap kinerja aparatur mencerminkan pada prinsip-prinsip pemerintahan yang baik diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Mewujudkan tujuan

pemerintahan yang baik tentu membutuhkan banyak hal serta cara yang perlu dilakukan salah satunya yaitu terdapat pada kinerja aparatur. (Rumalolas, 2018). Pencapaian kualitas dan kuantitas oleh seseorang atau organisasi dalam melaksanakan tugas yang sesuai dengan tanggung jawabnya dengan mencakup proses, hasil dan daya guna. Setiap individu dalam organisasi memiliki target dan hasil kerja yang baik dengan cara melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab, serta dikerjakan secara legal, berdasarkan hukum sesuai dengan moral dan etika yang berlaku. (Amalia, 2017). Di Satuan Kerja Pemerintah Daerah terdapat aparatur selaku individu yang menjalankan tugas serta wewenang sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan, maka perbaikan kinerja aparatur daerah terus dilakukan oleh pemerintah agar dapat bersaing secara lokal maupun global. Tercapainya tujuan sebuah instansi dalam meningkatkan kinerja instansinya sangat bergantung pada pekerjaan individu yang bersangkutan (Panjaitan & Shopiana, 2017).

Pengukuran kinerja mencakup berbagai aspek, sehingga setiap yang direncanakan harus dikaitkan dengan tingkat keberhasilan yang dapat dicapai (Agusti, 2012). Pengukuran kinerja juga berfungsi sebagai umpan balik yang mampu memperbaiki kinerja pemerintah secara berkelanjutan dan bisa memperbaiki kinerja pada periode berikutnya (Fidelius, 2013). Pemerintah dalam mewujudkan suatu hal tertentu membutuhkan banyak hal dan banyak cara yang perlu dilakukan salah satunya terdapat pada kinerja aparatur (Rumalolas, 2018). Dengan kondisi ini, pemerintah harus bekerja lebih keras lagi dalam memenuhi tuntutan masyarakat dan demi tujuan bersama. Kinerja individual

mengacu pada standar kerja yang telah ditetapkan oleh organisasi sebelumnya. Demi tercapainya kinerja yang baik dari sebuah pemerintahan dibutuhkan kapasitas individu yang berkualitas dalam melaksanakan tugasnya dengan baik (Satibi, 2011).

Tercapainya suatu tujuan bersama bergantung pada pemimpin maupun pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan (Damayanti, 2018). Dalam sebuah pemerintahan telah ditetapkan beberapa kriteria dan standar keberhasilan sebagai tolak ukur terlaksananya kinerja dengan baik. Maka dari itu perlunya kejelasan tujuan dan target untuk mengukur baik atau tidaknya kinerja seseorang dalam melaksanakan tugas dan menghasilkan *output*. (Moehariono, 2012).

Penelitian yang telah dilakukan oleh Arif (2009) mengatakan bahwa informasi dalam laporan keuangan dapat dikatakan andal apabila pengguna laporan keuangan dapat mengandalkan informasi yang menggambarkan kondisi ekonomi atau kejadian-kejadian. Keandalan adalah kemampuan seseorang untuk memberikan keyakinan bahwa informasi tersebut benar atau valid. Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur serta dapat diverifikasi. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang menyatakan informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan atau tidak sesuai dengan standar akuntansi Pemerintah.

Secara umum masih mempunyai kelemahan terutama yang terkait dengan pengelolaan keuangan. Dalam indikatornya menunjukkan efektivitas masih di bawah ideal, artinya masih ada target kinerja dalam pembangunan yang belum tercapai sesuai dengan sasaran target. Selain itu terdapat kelemahan pada bagian bendaharawan di setiap SKPD yang belum melakukan pengendalian secara maksimal. Kemudian Bagian keuangan setiap SKPD belum melaksanakan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Pembukuan dan pencatatan pada tingkat SKPD belum dilaksanakan dengan baik. Jika ditinjau dari pengendalian internal, bahwa masih ditemukan kelemahan dan kekurangan pada pelaksanaan APBD yaitu sistem dan prosedur akuntansi yang belum diterapkan secara maksimal pada bagian Keuangan pada masing-masing SKPD. Hal tersebut terbukti ditemukannya tidak konsisten pelaksanaan pengelolaan anggaran dengan aturan yang telah ditetapkan dimana belum optimalnya fungsi beberapa SKPD (Modus Aceh, 28 Mei 2015).

Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan didukung dengan teknologi informasi diharapkan dapat membantu dalam proses pelaporan keuangan sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang relevan, dapat diandalkan dan tepat waktu. Akan tetapi, selain sumber daya manusia dan teknologi informasi ada hal penting lainnya yang harus diperhatikan yaitu komitmen organisasi yang berfungsi untuk mengatur sikap dan bentuk perilaku seseorang terhadap organisasi dalam bentuk loyalitas dan pencapaian visi dan misi, nilai dan tujuan organisasi. Oleh karena itu untuk mendukung kemampuan sumber daya manusia agar lebih optimal maka pemerintah pusat maupun daerah

berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi untuk meningkatkan kemampuan mengelola Keuangan Daerah dan menyalurkan Informasi Keuangan Daerah (IKD) kepada pelayanan publik.

Tingkat kinerja perusahaan dapat dilihat dari kinerja sistem informasi akuntansi yang digunakan pemerintah tersebut. Kinerja pegawai secara umum dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri karyawan, yang meliputi kepuasan kerja dan komitmen organisasional. Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri karyawan, yang meliputi kepemimpinan, keamanan dan keselamatan kerja, serta budaya organisasi. Kinerja karyawan dalam perusahaan dipengaruhi oleh budaya organisasi dan kepuasan pegawai (Ismail,2006).

Peningkatan kinerja individu, pemerintahan yang telah menerapkan sistem informasi harus memperhatikan kemampuan pemakai dalam menggunakan sistem, kepercayaan pemakai sistem dan sejauh mana sistem tersebut berdampak positif, karena sering kali ditemukan penerapan teknologi sistem informasi yang tidak tepat dan tidak digunakan dengan maksimal secara akan membawa perusahaan yang lebih baik bagi kinerja individu. Efektivitas merupakan tolak ukur sejauh mana sistem mampu memberikan hasil dan seberapa baik sistem dapat dijalankan sesuai dengan yang diharapkan. Jika hasil yang diberikan sesuai dengan yang diharapkan pemakai dan semakin mudah sistem digunakan maka sistem tersebut dapat dikatakan efektif untuk digunakan. Informasi yang dibutuhkan tentu informasi yang berkualitas. Informasi yang berkualitas adalah

informasi yang didukung oleh relevansi, yaitu ketepatan dalam penggunaannya, ketepatan waktu, yaitu informasi mampu disajikan tepat pada saat dibutuhkan, dan akurat, yaitu harus tepat nilainya dan dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya. (maamir dan yadnyana,2008).

Informasi akuntansi adalah seluruh bagian terpenting dari informasi yang diperlukan oleh manajemen, terutama yang berhubungan dengan data keuangan dari suatu pemerintahan. Data tersebut perlu disusun dalam bentuk yang sesuai agar data keuangan yang ada dapat dimanfaatkan dengan baik oleh pihak manajemen maupun pihak luar pemerintahan. Data yang menjadi informasi diolah dengan cara manual maupun dengan bantuan komputer, atau merupakan sebuah rangkaian prosedur formal dimana data di kumpulkan dan diproses menjadi informasi, dan didistribusikan kepada para pemakai. Sistem informasi akuntansi memanfaatkan sumber daya yang ada didalam pemerintahan. Sumber daya berupa karyawan, mesin otomatis, komputer dan sumber daya lainnya.

Dinyatakan bahwa pemakaian akan memberikan nilai evaluasi yang positif tidak hanya dikarenakan oleh karakteristik yang melekat, tetapi lebih dari sejauh mana sistem informasi tersebut dapat dipercaya memenuhi kebutuhan tugas mereka dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Kecocokan tugas teknologi menjadi penting atas evaluasi pemakai artinya ada hubungannya dengan pencapaian kinerja individual yang tinggi sehingga mengarahkan individu untuk mencapai kinerja yang lebih baik dan menempatkan organisasi pada tingkat efektivitas yang diperlukan.

Data dalam sistem informasi tersebut seharusnya data yang terintegrasi dari seluruh unit pemerintahan sehingga dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan tugas dalam pemerintahan. Data yang terintegrasi dengan baik memberikan kepercayaan bagi pemakainya sebagai gambaran dalam membuat keputusan. Kepercayaan ini adalah hal penting yang diperlukan oleh pemakai sistem informasi akuntansi agar pemerintah merasa bahwa sistem informasi akuntansi yang diterapkan sapat meningkatkan kinerja individual dalam menjalankan tugasnya. Sistem informasi akuntansi diharapkan dapat membantu dalam menyelesaikan segala tugas-tugasnya, tetapi tidak semua sistem yang telah di praktekkan berjalan dengan baik sesuai dengan harapan pemakai.

Berdasarkan hasil pemeriksaan laporan keuangan kota langsa TA 2018, BPK masih menemukan beberapa permasalahan yang menyangkut persoalan dalam penyajian laporan keuangan dan peneliti juga menemukan beberapa permasalahan yang masih terjadi di SKPD kota langsa seperti laporan keuangan yang masih sulit dipahami oleh Kepala bagian keuangan, masih ada pegawai yang belum mengerti tentang apa itu Standar Akuntansi Pemerintah dan penerapannya, pemeriksaan terhadap catatan akuntansi, fisik kas, dan barang tidak dilakukan secara rutin, dan masih kurangnya perangkat komputer untuk membuat dan melaporkan laporan keuangan juga masih lambatnya penanganan untuk perangkat komputer yang usang atau rusak pada beberapa SKPD. Kinerja individu merupakan pengukuran kinerja pada diri seseorang yang merupakan pelaksanaan tugas negara dan dapat dikerjakan dengan bantuan serta dukungan fasilitas berupa sistem informasi akuntansi yang disediakan. Pemanfaatan yang tepat pada sistem

informasi akuntansi akan dapat memberikan dampak yang positif terhadap kinerja individu yang bekerja dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah, serta dengan ketepatan tugas yang menjadi tanggung jawabnya akan dapat memaksimalkan kinerja individu. (Sugartini dan Dharmadiaksa, 2016).

Pada kenyataannya masih terdapat permasalahan pada kinerja aparatur dalam menjalankan fungsi keuangan daerah seperti adanya tindakan korupsi yang dilakukan aparatur pemerintahan di Kota Langsa, namun kasusnya sering kali tidak diusut hingga tuntas sehingga opini WTP yang didapat oleh Kota Langsa dari tahun 2013 hingga 2018 tidak mencerminkan kewajaran yang semestinya. Hal itu menjadikan kinerja aparatur pemerintahan daerah juga dipertanyakan, seperti dilansir dari berita pada situs Aceh Journal National Network (AJNN) bahwasannya terungkap kasus korupsi pada tahun 2019 yang dilakukan oleh Wakil Direktur (Wadir) Bidang Administrasi Umum Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Langsa dan kasus tersebut sudah bermula pada tahun 2016, para pelaku dinyatakan sebagai tersangka pada tahun 2019. Kerugian negara pada kasus tersebut ditemukan dalam hasil audit BPK RI.

Keberadaan sistem informasi akuntansi dalam suatu organisasi menjadi sarana penting untuk menunjang kinerja individu yang bertugas menyediakan informasi akuntansi dan keuangan, maka dalam hal ini dibutuhkan sistem yang berkualitas dan dapat dipercaya. (Viprapastha & Sari, 2016). Untuk menerapkan sistem tersebut haruslah dilihat dari karakteristik organisasinya. Apakah dengan sistem informasi akuntansi mampu meningkatkan efisiensi sebuah organisasi, sehingga dalam penerapannya dibutuhkan orang yang handal agar dapat



mengoperasikan dengan baik. (Zahro, 2016). Dengan tersedianya sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan berlatar belakang akuntansi menjadikan hasil kinerja laporan keuangan yang disusun oleh aparatur yang bersangkutan menjadi lebih baik. Dengan semakin tinggi tingkat keahlian pengguna dalam menjalankan tugas yang sesuai dengan latar belakangnya, maka semakin efektif penerapan sistem informasi akuntansi di suatu organisasi yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja aparatur sekaligus instansi. (Ashianti dan Fani, 2013). Keahlian pengguna sistem informasi akuntansi merupakan kapasitas seseorang dalam mengerjakan berbagai macam tugas dan pekerjaannya dengan memanfaatkan kemampuan yang ada, diharapkan kegiatan tidak akan menyimpang jauh dari kegiatan pemerintah sehingga memberikan kepuasan. Peran pengguna menjadi hal yang penting dalam penerapan sebuah sistem informasi akuntansi di pemerintah. Dalam hal ini keberadaan manusia sebagai individu yang menjalankan sangat berperan penting dalam penerapan sistem informasi akuntansi. (Septriani, 2010).

Penelitian yang dilakukan oleh Suratini (2015), menunjukkan bahwa efektivitas sistem informasi akuntansi, dan penggunaan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja individual. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Zahro (2016), bahwasannya sistem informasi akuntansi dan pengendalian intern memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Namun penelitian yang telah dilakukan Panjaitan dan Shopiana (2017), menunjukkan bahwa variabel karakteristik tujuan anggaran dan desentralisasi berpengaruh positif terhadap kinerja aparat pemda. Sedangkan

variabel sistem informasi akuntansi tidak berpengaruh terhadap kinerja aparat pemda, dan desentralisasi tidak dapat memoderasi pengaruh karakteristik tujuan anggaran dan sistem informasi akuntansi terhadap kinerja aparat pemerintah daerah.

Dari beberapa penelitian menunjukkan hasil yang tidak sama, hal ini dikarenakan adanya perbedaan karakteristik responden dan perbedaan lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Sehingga hasil penelitiannya pun menunjukkan hasil yang berbeda. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, karena dalam penelitian ini menggunakan variabel keahlian pengguna sistem informasi akuntansi sebagai pemoderasi. Meskipun saat ini pencapaian kinerja pemerintahan Kota Langsa secara keseluruhan tergolong Baik, namun pada kenyataannya masih terdapat masalah pada kinerja aparaturnya.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan hasil penelitian sebelumnya diatas penulis tertarik melakukan penelitian tentang **“Pengaruh Informasi Akuntansi, Efektifitas Dan Keahlian Penggunaan Sistem Informasi Terhadap Kinerja Individual (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah)”**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan diteliti oleh penulis pada penelitian ini adalah:

1. Apakah sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kinerja individual pada Satuan Kerja Perangkat Daerah?

2. Apakah efektifitas sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kinerja individual pada Satuan Kerja Perangkat Daerah?
3. Apakah keahlian sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kinerja individual pada Satuan Kerja Perangkat Daerah?
4. Apakah sistem informasi akuntansi, efektivitas dan keahlian pengguna sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kinerja individual pada Satuan Kerja Perangkat Daerah?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui Pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap kinerja individual pada Satuan Kerja Perangkat Daerah
2. Untuk mengetahui Pengaruh efektifitas sistem informasi akuntansi terhadap kinerja individual pada Satuan Kerja Perangkat Daerah
3. Untuk mengetahui Pengaruh keahlian sistem informasi akuntansi terhadap kinerja individual pada Satuan Kerja Perangkat Daerah
4. Untuk mengetahui Pengaruh sistem informasi akuntansi, efektivitas dan keahlian pengguna sistem informasi akuntansi terhadap kinerja individual pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Hasil pemikiran yang diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja dalam penggunaan sistem informasi akuntansi berbasis komputer.
2. Sebagai tambahan pengetahuan dan sebagai bekal agar kelak dapat menerapkan kombinasi yang tepat antara teori dan keadaan praktis dalam lapangan pekerjaan yang sesuai.
3. Tambahan informasi yang dapat memberikan sedikit gambaran bagi peneliti lain yang ada hubungannya dengan penulis masalah ini.